

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, kewenangan pemerintah pusat dalam beberapa bidang didelegasikan menjadi kewenangan daerah (desentralisasi) termasuk kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sampai saat ini pemerintah telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. (Isroy, 2013).

Beberapa prioritas perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran cerdas melalui inovasi sistem akuntansi (Indra Bastian 2010:2).

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan Negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang Akuntansi Pemerintahan karena proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. (Binsar H. Simanjuntak, 2005)

Perubahan di bidang keuangan adalah dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. (Binsar H. Simanjuntak, 2005)

Pada hakekatnya di dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi (Ikin Solikin, 2010). Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD) dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana. Beberapa karakteristik keuangan daerah yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah adalah :

- a. Kebijakan akuntansi yang akan diterapkan (berhubungan dengan aset/kekayaan, kewajiban, modal, pelapor, dan lain-lain),
- b. Perlakuan akuntansi untuk berbagai hal (pendapatan, belanja/pengadaan pembentukan dana cadangan, penerimaan dan pengeluaran, pembiayaan),
- c. Kode rekening yang berlaku standar,
- d. Keuangan daerah yang diharapkan dapat memprosedur akuntansi (pengajuan dana, penganggaran, pengadaan, pelaporan, pertanggungjawaban, persediaan, penerimaan pendapatan, dan lain-lain), dan

- e. Perlu diciptakan formulir-formulir standar.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Penghargaan itu terkait predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berhasil diraih Pemda Kabupaten Ciamis sebanyak lima kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai 2017. (<https://www.harapanrakyat.com>)

Walaupun mendapatkan opini WTP, sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tanggal 31 Desember 2015, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern Kabupaten Ciamis untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas Sistem Pengendalian Intern. Adapun pokok-pokok kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan Kabupaten Ciamis yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut :

- Adanya Penggunaan Sisa Saldo Kas yang dibatasi penggunaannya untuk Belanja Rutin sebesar Rp. 14.337.857.951,60,- dengan menyajikan Saldo Kas di Kas Daerah (Kasda) per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 97.065.904.230,00. Saldo kas tersebut ditempatkan di Bank BJB Cabang Ciamis dan Bank Rakyat Indonesia
- Sedangkan dari Sisa Saldo Kas di Kas Daerah (Kasda) yang seharusnya adalah Rp. 111.403.762.181,60,-. Selisihnya yang tinggal dihitung, dan

itu baru sebagian kejanggalan yang disampaikan, dan masih banyak kejanggalan dan penyimpangan lainnya. Secara garis besar atas temuan tersebut diantaranya :

- Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum divalidasi secara memadai
- Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Ciamis belum tertib
- Terdapat Potensi Pendapatan Retribusi petak toko dan retribusi persampahan pada dua SKPD yang belum dipungut, dan
- Pemerintah Kabupaten Ciamis belum memiliki Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan bantuan sosial lainnya.

Untuk itu peran akuntan menjadi hal penting bagi terciptanya Laporan Keuangan yang berkualitas. “Tetapi pada kenyatannya, menurut sampai saat ini di Kabupaten Ciamis sendiri tenaga Akuntan bersertifikasi sangat minim, hanya terdapat satu akuntan formal yang telah tersertifikasi, pihak yang menyusun laporan keuangan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan UU pelaporan keuangan masih sedang disusun, yang mengatur tentang siapa pihak penyusun laporan keuangan,” ujar H. Kurniawan (<https://news.koropak.co.id>).

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah

menghasilkan suatu sistem keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Abdul Halim 2008:35)

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Setelah pemberlakuan dari *single entry* ke *double entry accounting* melalui PP No. 24 tahun 2005, dengan keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 merupakan jembatan kedua dalam akuntansi keuangan pemerintahan Indonesia untuk mengantarkan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual/cta*) ke arah akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual*).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Dalam rangka terwujudnya kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, salah satunya dengan penyusunan sistem akuntansi dan administrasi negara secara menyeluruh (LAN 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan memberikan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah taun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005).

Berbicara tentang laporan keuangan bahwa laporan keuangan adalah sebuah informasi ekonomi yang berasal dari sebuah sistem informasi yaitu akuntansi. Jadi, produk dari sebuah sistem informasi adalah informasi karena akuntansi adalah merupakan suatu proses yang kegiatannya mengolah data menjadi informasi yaitu laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 (Tahap I), menyatakan bahwa permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya permasalahan dalam pengadaan barang jasa yang menimbulkan indikasi kerugian daerah, pengelolaan rekening yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan potensi kecurangan, pengelolaan aset tetap yang masih bermasalah baik secara penatausahaan maupun pemanfaatannya, dan permasalahan pengelolaan PBB P2 yang sampai sekarang masih banyak yang belum tuntas. Permasalahan-permasalahan tersebut masih ditemukan namun nilainya tidak material sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada keempatbelas Pemerintah Daerah yang menerima LHP BPK. Sistem Pengendalian Intern di setiap Pemerintah Daerah terus mengalami perbaikan walaupun belum optimal. (<https://bandung.bpk.co.id>)

Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk

menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang buruk dengan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern.

Semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip good government, maka kebutuhan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin meningkat. Sistem akuntansi keuangan daerah perlu diterapkan secara optimal, yaitu dilaksanakan secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi organisasi, pemerintah dan negara dalam merealisasikan tujuan atau program secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari fenomena dan penelitian yang telah dilakukan di atas dapat penulis katakan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah harus menerapkan sistem pengendalian intern dan membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Munasyir (2015) <i>The effect of application of government accounting standards and goverment internal control systems to the quality of financial statements of working development units in North Aceh district</i>	Ketiga variabel yang diteliti sama yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan	Tidak ada perbedaan	Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jurnal Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol.4, No. 4 2015 ISSN 2302-0164
2	Dwi Febri S, Sri Rahayu, dan Wiralestari (2019) <i>The effect of SAP, HR competency and SPIP on the Quality of Regional Government Financial Statements with Accountability as Intervening Variables</i>	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Kompetensi SDM)	Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jurnal Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Vol.4, No. 3 2019 ISSN 2460-6235
3	M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan)	Variabel X (Kompetensi Aparatur, Peran Audit)	Bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh	Jurnal Magister Ilmu Akuntansi Universitas
No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Martiningsih	Variabel Y	Internal)	signifikan	Mataram NTB

	<i>The influence of human resources and SPI on the quality of financial statements</i>	(Kualitas Informasi Laporan Keuangan)		terhadap kualitas informasi laporan keuangan	Vol. 9, No. 1 2016 ISSN 2461-1190
4	Nikke Yusnita M, Ade Miranti (2018) <i>Impact of goverment and accounting standards human resources competency in report quality goverment Finance</i>	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Kompetensi Sumber Daya Manusia)	Bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Banten	Jurnal Akuntansi Vol. 5, No. 1 2018 P-ISSN 2339-2436 E-ISSN 2549-5968
5	T. Asri Yunita (2015) <i>The influence Of SAP, SPI and acoounting staff competencies on the quality of financial statement</i>	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Kompetensi Staf Akuntansi)	Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jom FEKON Vol. 2, No. 2 2015 ISSN 2355-6854
6 No	As Syifa Nurillah, Dul Muid Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Variabel X (Sistem Pengendalian Persamaan	Variabel X (Kompetensi Sumber Daya Perbedaan	Bahwa Sistem Pengendalian Intern Hasil Penelitian	Jurnal Akuntansi Fakultas Sumber
	(2014) <i>The effect of SPI, human resources competency, SAK and information</i>	Intern) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan, Teknologi Informasi)	berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Vol. 3, No. 2 2014

	<i>technology on the quality of financial statements</i>				ISSN 2337-3806
7	Susilawati, Dwi Seftihani Riana (2014) <i>Government Accounting Standards and Internal Control System as Antecedents of the Quality of Government Financial Statements</i>	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Tidak ada perbedaan	Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	STAR-Study & Accounting Research Vol.11, No. 1 2014 ISSN 1693-4482
8	Saiful M, Anna Sutrisna S, Ridwan Gumilar (2016) <i>SAP application and human resource competency on the quality of financial statements</i>	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Kompetensi Sumber Daya Manusia)	Bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (INFAK) Vol. 2, No. 1 2016 ISSN 2356-4482

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
9	Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dkk (2014) Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)	Bahwa kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
10	Ansella Putri (2015) Pengaruh Penerapan SAP dan SAK terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel X (Standar Akuntansi Pemerintahan) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Sistem Akuntansi Keuangan)	Bahwa SAP dan SAK berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
11	Rukmi Juwita (2013) Pengaruh Implementasi SAP dan SIA Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel X (Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Sistem Informasi Akuntansi)	Bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Trikonomika Vol 12, No.12 (2013) ISSN 1411-514X

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
12	Berry Wan Saputra (2015) Pengaruh Implementasi SAP, SIA, dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Variabel X (Implementasi SAP, Sistem Pengendalian Internal) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Sistem Informasi Akuntansi)	Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan	JOM FEKON Vol. 2 No. 2 (2015)
13	Novtania Mokoginta, Linda Lambey, dan Winston Pontoh (2017) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel X (Pengendalian Intern) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)	Bahwa Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No.2 (2017) ISSN 874-890
14	Dimas et all (2018) Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel X (Sistem Pengendalian Internal) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	Variabel X (Kompetensi SDM)	Bahwa SPI berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran
15 No	Desiana Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Variabel X Persamaan	Variabel X Perbedaan	Bahwa Hasil Penelitian	Jurnal Riset Sumber

Anugrah Budiawan dan Budi S. Purnomo (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	(Sistem Pengendalian Internal) Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan)	(Kekuatan Koersif)	penerapan SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan	Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No.1 (2014) ISSN 276-288
Dina Apriliyani Sopyan (2020): Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Sensus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis).				

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel independen (X_1) dan Pengendalian Intern Pemerintah sebagai variabel independen (X_2) dan Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen (Y), dengan melakukan penelitian studi pada OPD Pemerintah Kabupaten Ciamis. :

“Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” (Sensus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern, serta Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ciamis
2. Bagaimana pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ciamis, baik secara parsial maupun simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern, serta Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri apabila kedepannya setelah lulus kuliah dapat terjun pada suatu

perusahaan atau instansi dan memiliki permasalahan seperti ini dapat teratasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teori yang telah dimiliki selama masa perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas dari laporan keuangannya.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.5 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ciamis.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun waktu yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dari bulan Februari 2020 sampai bulan Agustus 2020.